

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran lembaga keuangan dalam suatu negara sangat penting dalam memacu pertumbuhan perekonomian, tanpa terkecuali lembaga keuangan mikro. Dengan adanya lembaga keuangan mikro yang bertindak sebagai *financial intermediary institution* atau lembaga perantara keuangan yang tugas pokoknya menghimpun dana dari pihak yang memiliki dana lebih kepada pihak yang membutuhkan dana, diharapkan perekonomian suatu negara bisa berjalan dengan lancar. Tidak dipungkiri lagi bahwa Pertumbuhan perekonomian suatu negara juga dipengaruhi oleh sektor-sektor UMKM produktif yang tidak semuanya dijangkau oleh bank umum. Perkembangan sektor-sektor UMKM tersebut bisa terbantu dengan adanya lembaga keuangan mikro yang dapat menyalurkan dana untuk membiayai sektor – sektor UMKM yang produktif.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan tentunya membutuhkan lembaga keuangan yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebutuhan tersebut terpenuhi dengan hadirnya lembaga keuangan mikro di Indonesia dengan sistem bebas bunga (Muhammad, 2005:15). Kehadiran lembaga keuangan mikro di Indonesia dapat membantu pertumbuhan UMKM.

Lembaga keuangan mikro pada penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dikarenakan sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang ini sudah banyak sekali BPR/BPRS yang tumbuh di lingkungan pedesaan, selain itu BPRS juga sudah memiliki jalinan yang solid kepada masyarakat pedesaan sehingga kedua belah pihak sudah seperti partner bisnis. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan jumlah jaringan kantor BPRS.

TABEL 1.1
Jumlah Kantor BPRS

tahun/kuartal	jumlah BPR	jumlah kantor
2011/ 1	152	292
2	154	300
3	154	362
4	155	364
2012/ 1	155	374
2	156	378
3	156	386
4	158	401
2013/ 1	159	399
2	159	397
3	160	413
4	163	402
2014/ 1	163	431

Sumber: www.bi.go.id/statistik perbankan Syariah 2014

Berdasarkan tabel 1.1 Jumlah kantor BPRS yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, sejak dari tahun 2011 sampai tahun 2014 saja sudah mengalami peningkatan jumlah kantor sebanyak 139 kantor BPRS, dalam hukum permintaan yang pada hakikatnya merupakan hipotesis yang menyatakan, *makin rendah harga suatu barang maka makin banyak*

permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya makin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut.

Dapat disimpulkan dari teori diatas yaitu, semakin sedikit bank menarik bagi hasil dari pembiayaan yang di berikan kepada masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang akan melakukan pembiayaan pada bank tersebut, maka bank tersebut akan memiliki nasabah yang berlimpah dari berbagai daerah sehingga mereka akan membuka kantor di daerah-daerah tersebut (Sukirno, 2006: 76).

Bank sebagai lembaga perantara keuangan, pendapatan utama BPRS adalah keuntungan dari kegiatan penyaluran dana. Dengan demikian pertumbuhan BPRS dapat diukur dari ekspansi usahanya yang dalam hal ini adalah pertumbuhan penyaluran pembiayaan. Dengan mengukur pertumbuhan pembiayaan maka dapat diketahui seberapa baik kinerja BPRS melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis syariah dalam mendukung pertumbuhan perekonomian (muhammad, 2005: 65).

Pertumbuhan pembiayaan BPRS bisa ditingkatkan dengan dukungan dari variabel perbankan dan faktor-faktor makro ekonomi itu sendiri dari suatu negara.

TABEL 1.2**Perkembangan Indikator Perbankan Syariah (dalam persen)**

Indikator	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
DPK	0.725	2.819	1.970	3.156
ROA	3.58	3.49	2.67	2.64
NPF	7.03	6.50	7.05	6.15
EQUIVALENT RATE	12.30	11.61	11.72	6.27
INFLASI	2.78	6.96	3.79	4.30
KURS	9.15	9.11	9.11	9.17

Sumber: www.bi.go.id/statistik perbankan Indonesia 2014

Berdasarkan tabel 1.2 kinerja bank bisa dilihat dari kinerja keuangannya. Dalam hal ini faktor terpenting yang perlu diperhatikan adalah pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), dari tahun 2009 hingga 2012 jumlah dana pihak ketiga di BPRS selalu mengalami peningkatan yang baik yaitu dari 0.725 sampai 3.156 pada tahun 2012 (Statistik Perbankan Indonesia, Des 2012).

Karena dana terbesar yang digunakan perbankan dalam operasionalnya adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Seperti halnya Bank Mandiri dapat mengembangkan sayapnya hingga luar negeri dikarenakan memiliki dana yang besar sehingga mereka juga bisa melakukan pembiayaan yang cukup besar pula. Untuk menarik nasabah yang banyak dan mendapatkan DPK yang banyak, bank pun menggunakan *equivalent rate* guna menarik minat nasabah agar mau meletakkan dananya ke bank tersebut, jika bank mendapatkan dana yang banyak maka bank akan dapat melebarkan sayapnya dengan melakukan pembiayaan yang lebih besar lagi, seiring bertumbuhnya dana pihak ketiga pada BPRS

nilai *equivalent rate* juga mengalami fluktuasi dari tahun 2009 sebesar 12.30 lalu pada tahun 2010 menjadi 11.61 sehingga pada tahun 2011 mengalami kenaikan kembali menjadi 11.72. Nilai *equivalent rate* pada tahun 2009 memiliki nilai tertinggi dibandingkan nilai pada tahun 2010 dan 2011, yaitu dikarenakan bank membutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk menabung kembali pada bank-bank mereka sehingga mereka memberikan nilai *equivalent rate* yang sangat tinggi untuk menarik nasabah guna menabung di bank mereka (Statistik Perbankan Indonesia, Des 2012).

Selain itu nilai NPF pasca krisis (2009) telah mengalami penurunan kembali yaitu tahun 2009 sebesar 7,03; 2010 sebesar 6,50; 2011 sebesar 6,11 dari data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah setelah terjadinya krisis 2008 telah mulai kembali pulih. Rendahnya pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan kepercayaan diri BPRS dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, sehingga disiplin pasar baik dalam penyaluran pembiayaan tentunya akan mendukung pertumbuhan pembiayaan itu sendiri serta dapat meningkatkan profitabilitas BPRS tersebut (www.bi.go.id).

BPRS sebagai lembaga keuangan yang berbasis sektor riil, dari sisi eksternal BPRS memiliki keterkaitan langsung dan sensitifitas yang tinggi terhadap kondisi makro ekonomi yang terjadi. Sebagai variabel makro yang merupakan cerminan dari keadaan perekonomian, gejala-gejala yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi kinerja BPRS. Ketika kinerja makro ekonomi baik maka

kinerja penyaluran dana BPRS secara otomatis juga akan baik dan begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) tahun 2009, pertumbuhan aset perbankan syariah mengalami perlambatan pada tahun 2009, walaupun secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang positif. Perlambatan yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi sektor riil yang terjadi, seperti masih adanya kelesuan ekonomi nasional, belum pulihnya daya beli masyarakat, dan biaya ekonomi yang tinggi yang berdampak pada adanya pembatasan ekspansi usaha dan pengurangan konsumsi. Namun demikian perlambatan di industri perbankan syariah relatif minor dibandingkan dengan perlambatan industri keuangan nasional secara umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai gagasan untuk meneliti pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mulai tahun 2009 dikarenakan pada tahun tersebut sudah mulai pulih perekonomian di Indonesia setelah krisis 2008, dan juga pada tahun tersebut mulai bisa dijadikan acuan standar pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang mana pada hal ini diwakili oleh pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor pada BPRS yang dapat mempengaruhi fluktuasi pembiayaan BPR syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan terkait pertumbuhan pembiayaan BPR Syariah maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *equivalent rate* terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh Kurs terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *equivalent rate* terhadap pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kurs terhadap pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

D. Batasan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian dibatasi pada pertumbuhan pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pasca krisis global yaitu tahun 2009 sampai 2014. Data yang saya gunakan adalah data sekunder dalam bentuk data bulanan BPRS yang saya ambil dari statistik perbankan indonesia bank Indonesia, variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada

pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, *Return On Asset*, dan *Non Performing Financing*, Inflasi, *Equivalent rate* dan Kurs.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang memberitambahkan pengetahuan serta pengalaman sehingga penulis dapat mengembangkan ilmu yang didapat diprogram studi Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya dalam bidang pembiayaan bank syariah.
2. Bagi peneliti, menjadi sumber referensi bagi peneliti yang sedang melakukan evaluasi atau mengatasi masalah yang sama dan memberikan bahan acuan bagi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi BPR syariah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pembuat regulasi/ kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan pembiayaan.